

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polemik mengenai limbah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang belum mampu dipecahkan secara konkrit oleh manusia. UN Environment Programme bahkan mengklaim bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah merupakan bagian dari *triple planetary crisis*, yakni serangkaian problematika alam yang terdiri dari krisis perubahan iklim, krisis alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta krisis polusi dan limbah. Permasalahan limbah sendiri berkontribusi atas 5% emisi global (UNEP, 2022).

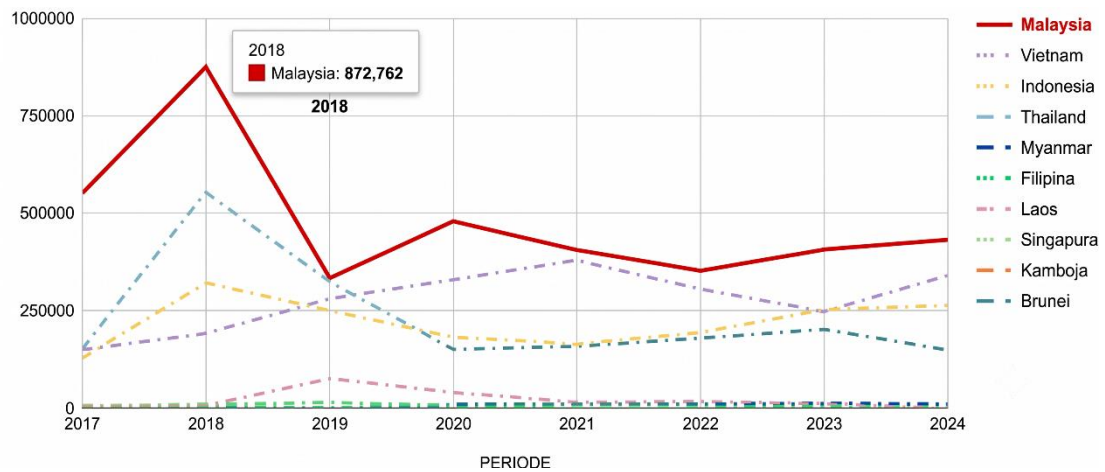
Kompleksitas permasalahan limbah plastik berkaitan dengan sifatnya yang tidak bisa dengan mudah terurai di tanah sampai ratusan tahun (Dey et al., 2024, p. 70). Karena sifatnya yang sulit terurai, limbah plastik mampu membuat akumulasi yang berlebihan di tempat pembuangan terbuka, sehingga mampu menyebabkan kesuburan tanah yang terganggu dan menghalangi aliran air. Akumulasi limbah plastik dari tahun 1950-2015 saja diestimasi mencapai 6500 metrik ton dengan 78% di antaranya berakhir di tempat pembuangan terbuka (Tan et al., 2025). Limbah plastik yang dibakar juga memiliki dampak yang mengancam. Asap hasil pembakaran limbah plastik mampu melepaskan bahan kimia yang berbahaya bagi atmosfer dan juga bagi keberlangsungan ekosistem (Pilapitiya & Ratnayake, 2024). Terlepas dari risiko degradasi lingkungan dan kesehatan yang tinggi, Interpol (2020) mengungkapkan bahwa

limbah plastik merupakan komoditas yang memiliki cakupan perdagangan transnasional yang luas.

Pada 2018, Asia Tenggara tercatat mengalami peningkatan impor limbah plastik secara drastis setelah Tiongkok memutuskan untuk melakukan pembatasan impor 24 jenis limbah padat melalui National Sword Policy (Cotta, 2020, p. 265). Hal ini didukung oleh penelitian Uhm (2021) yang mengatakan bahwa Asia Tenggara mengalami peningkatan impor limbah plastik sebanyak 171% pada 2018 (2,231,127 ton) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (836,529 ton). Peningkatan drastis yang dialami Asia Tenggara diakibatkan oleh negara pengekspor limbah plastik, seperti negara-negara di Eropa, Amerika Utara, maupun Jepang yang pada awalnya menargetkan Tiongkok sebagai pasar utama mulai mengalihkan eksportnya ke wilayah Asia Tenggara untuk menjawab permintaan industri daur ulang limbah yang tinggi (Tan et al., 2025).

Porsi impor limbah plastik Asia Tenggara yang masif tersebut didominasi oleh Malaysia sebagai importir tertinggi. Grafik yang diolah melalui database Trade Map menunjukkan bahwa Malaysia menjadi negara dengan tingkat impor limbah plastik tertinggi dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (Gambar 1.1). Awal mula lonjakan impor limbah plastik di Malaysia sendiri mulai terjadi dalam kurun waktu Januari-Juli 2018 (Nurratri et al., 2024). Malaysia diketahui tercatat telah mengimpor sebanyak 872.762 ton limbah plastik pada tahun 2018 (Gambar 1.1). Beberapa negara yang berkontribusi atas impor limbah plastik di Malaysia antara lain Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Britania Raya, dan Belgium (Wong, 2024, p. 264).

Gambar 1. 1 Kuantitas Impor Limbah Plastik (HS 3915) Negara Kawasan Asia Tenggara (Ton) Periode 2017-2024



Sumber: (Trade Map, 2025)

Posisi Malaysia sebagai penerima impor limbah plastik yang tinggi pada tahun 2018 membuat Malaysia turut menghadapi peningkatan kejahatan lingkungan, seperti *mislabeling* dan penyelundupan limbah yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah Malaysia (Interpol, 2020). Sebagai contoh, dikutip melalui Nexus Foundation, pada 2021, Malaysia tercatat menerima kiriman limbah plastik campuran berupa *mixed polymer plastic* dari Amerika Serikat dengan perkiraan kadar kontaminasi limbah berada di atas 5% sebagai ambang batas yang telah ditentukan oleh Malaysia. Malaysia juga diketahui telah secara intens mengembalikan kontainer yang berisi limbah plastik ilegal ke negara asalnya. Dikutip melalui BBC, Yeo Bee Yin

selaku menteri lingkungan hidup Malaysia telah mengembalikan 42 kontainer yang berisi limbah plastik ilegal ke Inggris sebagai eksportir pada tahun 2020. Kemudian, masih pada tahun yang sama, CNN (2020) turut memberitakan pengembalian limbah plastik ilegal dengan total 150 kontainer. Pada tahun berikutnya, Reuters (2021) juga memberitakan keputusan Malaysia untuk kembali mengembalikan 267 kontainer limbah plastik ilegal ke negara asalnya.

Masuknya impor limbah plastik ilegal membuat Malaysia harus menerima sejumlah dampak kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Penelitian dari Wong (2024) mengungkap bahwa masuknya impor limbah plastik kode HS 3915 secara ilegal memicu berbagai dampak lingkungan dan kesehatan yang memprihatinkan bagi masyarakat Malaysia. Limbah plastik impor yang memiliki kualitas yang rendah untuk didaur ulang dibiarkan begitu saja secara terbuka di sekitar area pabrik daur ulang ilegal atau secara ilegal dibakar di area perkebunan sawit yang kemudian mampu mengeluarkan polusi asap terhadap udara, air, dan tanah (Wong, 2024, p. 269).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Malaysia telah mengambil serangkaian tindakan dalam menekan impor limbah plastik sejak 2018 melalui pemberlakuan pengetatan aturan bagi importir Malaysia, pengembalian kontainer yang berisi limbah plastik ilegal ke negara asalnya, penetapan pajak impor limbah plastik, dan penutupan fasilitas atau pabrik pengolahan plastik ilegal (Waste Dive, 2018). Pada Juli 2025, Malaysia juga mulai mengeluarkan Customs (Prohibition of Import) (Amendment) Order 2025 yang secara garis besar berisi mengenai ketentuan impor limbah plastik yang semakin diperketat, serta adanya regulasi baru dimana Malaysia tidak akan

menerima limbah plastik dari negara-negara yang tidak termasuk ke dalam Konvensi Basel sebagai perjanjian internasional di bidang yang mengontrol perdagangan limbah berbahaya (Environmental Investigation Agency, 2025).

Di balik serangkaian tindakan tersebut, aktor non-negara memainkan peran krusial sebagai katalisator kebijakan terhadap impor limbah plastik di Malaysia. Dalam hal ini, Organisasi Non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organization (NGO)* memiliki peran krusial. Yunus et al. (2018) dalam Shafar & Isnaeni (2022) mengungkapkan tiga alasan mengapa aktivisme NGO memiliki peran yang cukup signifikan dalam hubungan internasional. Yang pertama, adanya peningkatan otoritas dan keterlibatan NGO dalam forum utama dunia. Yang kedua adalah menguatnya legitimasi kompetensi kebidangan suatu NGO terhadap isu spesifik. Alasan yang terakhir adalah NGO yang dipandang sebagai kekuatan progresif-normatif dunia.

Apabila menyempitkan fokus pada sektor lingkungan, NGO dianggap sebagai aktor terbaik dalam berperan sebagai perwakilan masyarakat sipil dalam mempengaruhi perumusan kebijakan di sektor lingkungan oleh pemegang kebijakan (Nugroho & Angela, 2024). Dalam kasus Malaysia, peran krusial NGO juga didukung dengan hasil dari Edelman Trust Barometer Survey (2022) yang menyatakan bahwa pada periode 2021, level kepercayaan masyarakat Malaysia terhadap NGO mengalami peningkatan 1 poin menjadi sebesar 70% ketika di satu sisi kepercayaan terhadap aktor negara menurun 3 poin menjadi 60%.

Greenpeace merupakan salah satu INGO (*International non-governmental Organization*) di sektor lingkungan yang memiliki kantor perwakilan regional di

Malaysia dengan fokus di bidang advokasi isu lingkungan global. Sebagai NGO yang bergerak di sektor lingkungan, Greenpeace Malaysia menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu lingkungan yang ditimbulkan oleh impor limbah plastik di Malaysia. Hal ini tercermin melalui upaya Greenpeace Malaysia dalam menggeser wacana mengenai impor limbah plastik yang pada awalnya dianggap sebagai polemik perdagangan biasa menjadi isu keamanan. Upaya ini dimanifestasi ke dalam berbagai publikasi digital, pelaksanaan investigasi lapangan, dan *lobbying* perubahan kebijakan untuk melarang atau meminimalisir praktik impor limbah plastik di Malaysia sejak tahun 2018 (Greenpeace Malaysia, n.d.).

Urgensi dilakukannya penelitian mengenai strategi konstruksi ancaman oleh Greenpeace Malaysia berputar pada perannya sebagai NGO sektor lingkungan yang berhasil mendorong pergerakan dari sektor institusional, kabinet negara bagian Selangor untuk melakukan operasi penindakan fasilitas atau pabrik daur ulang ilegal setelah Greenpeace Malaysia secara langsung memberikan hasil laporan investigasi praktik impor limbah yang mengungkap sindikat kejahatan transnasional di dalamnya (Chun, 2019).

Dengan melihat adanya pergerakan di sektor formal dan pergeseran wacana tentang praktik impor limbah plastik menjadi isu ancaman di Malaysia, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Greenpeace Malaysia dalam mengkonstruksi praktik impor limbah plastik sebagai isu dan ancaman politik dan menjadi katalisator pengambilan kebijakan publik yang mengatur praktik tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan **“Bagaimana strategi sekuritisasi yang dilakukan oleh Greenpeace Malaysia terhadap praktik impor limbah plastik di Malaysia?”**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi yang digunakan oleh Greenpeace Malaysia dalam membawa praktik impor limbah plastik sebagai isu non-politis menjadi isu politis.

1.3.2. Tujuan Khusus

Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini memiliki 3 tujuan khusus, yakni:

1. Mengidentifikasi konteks situasional objektif yang digunakan Greenpeace Malaysia sebagai basis upaya sekuritisasi
2. Menganalisis target audiens dan *semantic repertoire* audiens tersebut yang dimanfaatkan oleh Greenpeace Malaysia
3. Menganalisis kemampuan dan tindakan pragmatis Greenpeace Malaysia dalam menyoroti praktik impor limbah plastik

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi pengembangan studi keamanan yang dilakukan oleh aktor non-negara.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana peran aktor non-negara dalam melakukan sekuritisasi isu lingkungan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai strategi diskursus NGO Greenpeace dalam membentuk persepsi ancaman terhadap isu impor limbah plastik Malaysia, penelitian menggunakan empat literatur dengan fokus analisis sekuritisasi dan peran aktor non-negara.

Literatur pertama bertajuk *Peran Greenpeace dalam Upaya Sekuritisasi Isu Sampah Plastik di Thailand* yang ditulis oleh Hidayat Chusnul Chotimah & Age Sulistyoningsih (2023). Melalui penelitian Chotimah & Sulistyoningsih (2023), diketahui bahwa Greenpeace Thailand berperan dalam melakukan sekuritisasi isu sampah plastik melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat dan pemerintah Thailand dengan tujuan mengedukasi kondisi lapangan dari isu polusi plastik di Thailand. Reputasi Greenpeace dalam pengelolaan lingkungan menjadi *facilitating condition* yang turut mendukung keberhasilan proses sekuritisasi. Dalam analisisnya, Chotimah

& Sulistyoningsih (2023) menggunakan kerangka teori sekuritisasi dan konsep *International Non-Governmental Organization* (NGO). Fokus penelitian dari Chotimah & Sulistyoningsih (2023) berputar pada proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Greenpeace sebagai aktor *non-state* terhadap isu lingkungan domestik Thailand.

Selanjutnya, literatur kedua ditulis oleh Fajar Ajie Setiawan & Fitriana Putri Hapsari (2018). Sama seperti literatur pertama, penelitian Setiawan & Hapsari, (2018) yang berjudul *Securitizing e-Waste: Framing Environmental Issue as a Threat to Human Security* juga menggunakan teori sekuritisasi, tetapi dengan tambahan konsep *human security* sebagai pelengkap kerangka teoritis. Penelitian tersebut menemukan adanya proses tindakan sekuritisasi isu limbah elektronik menggunakan *framing* keamanan manusia oleh berbagai aktor nasional. Meski begitu, proses sekuritisasi limbah elektronik belum sepenuhnya berhasil karena kebijakan nasional yang masih tidak konsisten menganggap limbah elektronik sebagai ancaman ekstrim dan memerlukan tindakan luar biasa. Apabila penelitian Chotimah & Sulistyoningsih (2023) berfokus pada peran aktor *non-state* dalam proses sekuritisasi isu lingkungan, maka penelitian Setiawan & Hapsari (2018) lebih menekankan pada peran aktor negara dalam mensekuritisasi isu serupa.

Literatur ketiga ditulis oleh Luisa Fechner (2023) dengan judul *Border Burden? A Critical Discourse Analysis on the Securitization of Migration in the Maltese Media Discourse*. Fokus dari literatur ini adalah proses sekuritisasi isu migran yang dilakukan oleh aktor *non-state*, yakni media massa dengan menekankan pada analisis diskursus. Analisis diskursus yang menjadi fokus penelitian membuat Fechner (2023)

menggunakan kerangka teori sekuritisasi dan *social identity* yang dikolaborasikan dengan metode Wacana Analisis Kritis atau *Critical Discourse Analysis (CDA)* dalam proses analisisnya. Melalui penelitian tersebut, Fechner (2023) menemukan bahwa media massa di Malta membingkai isu migrasi sebagai ancaman terhadap identitas nasional, beban ekonomi, dan sumber ketidakstabilan sosial. Hal ini bisa dilihat melalui analisis pilihan bahasa, metafora, frasa, dan konstruksi naratif media yang banyak menggunakan metafora perang, pelabelan negatif, simplifikasi identitas, dan dikotomi “kami” vs “mereka”. Selain dari diskursus itu sendiri, proses sekuritisasi oleh media massa di Malta juga dapat dilihat melalui proses sosial di balik proses produksi narasi, yakni adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang ditunjukkan oleh migran yang tidak pernah diposisikan sebagai subjek yang berbicara, tetapi selalu sebagai objek yang dibicarakan.

Untuk menunjang ketiga literatur sebelumnya yang sangat menitikberatkan pada proses sekuritisasi, penulis juga menggunakan literatur dari Yasmin Nadhifah Sunardi (2021) yang berjudul *Upaya Greenpeace dalam Mengurangi Limbah Plastik di Indonesia* sebagai penunjang aspek peran aktor *non-state* dalam menanggapi isu lingkungan. Menggunakan kerangka konsep *Social Movement* dan Organisasi Internasional, Sunardi (2021) berargumen bahwa dalam menangani permasalahan limbah plastik di Indonesia, Greenpeace sebagai NGO di bidang lingkungan berperan sebagai penyedia sarana informasi melalui riset dan investigasi fenomena limbah plastik di Indonesia. Selain itu, Greenpeace juga berperan dalam memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Berbagai peran dan

upaya yang dilakukan Greenpeace ditujukan untuk mendorong pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan limbah plastik di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan penulis terhadap keempat literatur sebelumnya, diketahui bahwa riset mengenai strategi dan proses sekuritisasi isu lingkungan oleh aktor *state* maupun *non-state* telah banyak dilakukan. Meski begitu, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa masih minimnya riset sekuritisasi yang mempertimbangkan fenomena objektif atau konteks eksternal sebagai variabel dalam strategi sekuritisasi yang digunakan oleh aktor. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut melalui riset yang berfokus pada analisis strategi *pragmatic act* NGO Greenpeace Malaysia dalam mengkonstruksi praktik impor limbah plastik sebagai sebuah ancaman. Adapun urgensi pemilihan topik terletak pada adanya pengaruh signifikan di level institusional dan publik oleh Greenpeace Malaysia sebagai entitas non-politis dalam mengkonstruksi praktik impor limbah plastik sebagai ancaman.

1.5.2. Teori Sekuritisasi Sosiologis

Penelitian menggunakan teori sekuritisasi sebagai alat analisis dalam menjawab rumusan masalah. Teori sekuritisasi merupakan turunan dari paradigma konstruktivisme linguistik, termasuk merupakan bagian dari studi keamanan (Rosyidin, 2022). Secara garis besar, teori sekuritisasi membantu menjelaskan mengenai proses bagaimana suatu isu dapat dikonstruksi sebagai sebuah wacana

(Rosyidin, 2022). Buzan et al. (1998) mendeskripsikan sekuritisasi sebagai proses membawa suatu isu keluar dari aturan politik biasa agar dapat melegitimasi penggunaan langkah-langkah darurat. Langkah darurat yang dimaksud seperti tindakan atau regulasi khusus yang digunakan untuk mengatasi ancaman eksistensial terhadap objek yang harus dilindungi dari ancaman Flohr (2025).

Dalam melakukan penelitian menggunakan teori sekuritisasi, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan, yakni pihak yang merasa terancam (*referent object*), aktor sekuritisasi sebagai aktor yang mendefinisikan isu sebagai ancaman, dan *functional actor* atau aktor yang memperkuat persepsi ancaman, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam proses sekuritisasi (Rosyidin, 2022). *Referent object* pada sekuritisasi klasik seringkali diposisikan sebagai negara. Akan tetapi, teori sekuritisasi kontemporer memperluas *referent object* tidak hanya pada negara, tetapi juga pada manusia. Selanjutnya, aktor sekuritisasi (*securitization actor*) merupakan seseorang atau kelompok yang melakukan tindak tutur (*speech act*) keamanan. Aktor sekuritisasi dapat berupa pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, atau bahkan kelompok tekanan (Buzan et al., 1998).

Mazhab Kopenhagen mengungkapkan dilema sekuritisasi sektor lingkungan, dimana Buzan et al. (1998) berpendapat bahwa upaya menyekuritisasi isu lingkungan hanya dapat menghasilkan politisasi, tidak sampai ke dalam tahap sekuritisasi. Hal ini dikarenakan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi isu lingkungan sulit dilabeli sebagai tindakan luar biasa (*exceptional measures*). Mazhab kopenhagen sendiri menggunakan penerapan tindakan luar biasa di luar politik normal

(*extraordinary emergency measures*) untuk menjelaskan apakah suatu isu memang menjadi isu keamanan (Balzacq et al., 2015, p. 108).

Beberapa peneliti bidang keamanan mencoba mengkritik Mazhab Kopenhagen yang terlalu berfokus pada pengambilan tindakan luar biasa (*exceptional measures*) sebagai esensi dari sekuritisasi. Thierry Balzacq bersama dengan Sarah Leonard, dan Jan Ruzicka melalui '*Securitization*' Revisited: *Theory and Cases* (2015) mengkritisi sekuritisasi mazhab kopenhagen yang dinilai terlalu *self-referential* dengan memfokuskan pada *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dan menganggap audiens hanya bersifat pasif.

Kerangka sekuritisasi yang diusulkan oleh Balzacq et al. (2015) lebih dikenal sebagai sekuritisasi sosiologi dengan mencoba mengisi kekurangan aspek interaksi sosial, dinamika kekuasaan, dan konteks eksternal yang kurang ditonjolkan dari sekuritisasi Mazhab Kopenhagen. Teori sekuritisasi sosiologis memiliki asumsi dasar bahwa upaya atau strategi sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor berfokus pada penerimaan audiens, atau dalam kata lain bersifat *audience-centered*.

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang membedakan sekuritisasi sosiologi Balzacq dengan sekuritisasi Mazhab Kopenhagen. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana ancaman dibentuk. Mazhab Kopenhagen mengadopsi pandangan internalis yang menganggap bahwa bahasa yang dituturkan melalui *speech act* dan dikombinasikan dengan penerapan aturan konstitutifnya dapat membangun realitas, atau dalam hal ini adalah klaim ancaman yang diajukan oleh aktor sekuritisasi (Balzacq, 2005, p. 180). Sedangkan itu, sekuritisasi sosiologi mengadopsi pandangan

eksternalis, dimana dalam rangka menarik audiens, klaim keamanan harus berkaitan dengan realitas eksternal. Sekuritisasi sosiologi menganggap bahwa ancaman tidak sepenuhnya bersifat subjektif yang muncul melalui hasil konstruksi sosial maupun sepenuhnya objektif, melainkan merupakan gabungan dari keduanya. Sisi objektivitas mempengaruhi bagaimana ancaman dipersepsikan, sedangkan untuk pemaknaan ancaman itu sendiri tetap dikonstruksi secara sosial (Balzacq, 2005, p. 109).

Perbedaan keduanya juga datang dari penentuan apakah suatu isu benar didefinisikan sebagai ancaman keamanan atau tidak. Mazhab Kopenhagen menganggap bahwa kondisi tersebut ditentukan dari audiens yang secara eksplisit menyetujui klaim ancaman. Sedangkan itu, sekuritisasi sosiologi justru menilai bahwa penilaian persetujuan audiens terhadap klaim ancaman secara eksplisit merupakan hal yang sulit dan menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian sekuritisasi. Dengan demikian, sekuritisasi sosiologi menganggap bahwa persetujuan eksplisit audiens tidak menjadi satu-satunya penentu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti praktik birokrasi, teknologi, rutinitas kebijakan, dll (Balzacq et al., 2015, p. 108).

Melalui publikasinya yang berjudul *The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience, and Context* (2005), Balzacq menjelaskan tiga pilar utama penopang teori sekuritisasi sosiologi, yakni *political agency*, *audience*, dan *context*.

Pilar pertama adalah *context-dependent*, yang berarti bahwa upaya sekuritisasi dilakukan selaras dengan realita eksternal atau konteks sosial-politik ada. Pilar konteks

menentukan tingkat kepercayaan dan penerimaan audiens kepada aktor yang melakukan upaya sekuritisasi.

Pilar kedua adalah *agency* yang mencoba menganalisis lebih dalam mengenai aktor yang melakukan sekuritisasi. Pilar *political agency* berfungsi untuk menganalisis kapasitas dan legitimasi sosial aktor sekuritisasi dalam rangka memobilisasi dukungan audiens (Balzacq, 2005, p. 186).

Pilar terakhir adalah *audience*, yakni pilar yang sekaligus menjadi gagasan utama dari Balzacq. Balzacq menegaskan bahwa upaya sekuritisasi bersifat *audience-centered*, artinya audiens tidak bersifat pasif, melainkan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan upaya sekuritisasi. Hal ini dikarenakan kesuksesan sekuritisasi dipengaruhi oleh kapabilitas aktor sekuritisasi dalam memahami sudut pandang audiens dalam rangka mencapai efek perlokusi (Balzacq, 2005, p. 184). Balzacq (2005) dalam Does (2013) menyebutkan bahwa efektivitas sekuritisasi ditentukan dari penerimaan klaim ancaman yang dibawakan oleh aktor sekuritisasi oleh target audiens. Dengan demikian, untuk memaksimalkan upaya sekuritisasi, aktor sekuritisasi mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan audiens (Does, 2013).

Melalui uraian di atas, sekuritisasi sosiologi merupakan kerangka teori yang relevan dalam menganalisis strategi sekuritisasi oleh aktor non-negara, dimana dalam hal ini aktor non-negara merujuk pada NGO Greenpeace Malaysia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan habitus Greenpeace Malaysia sebagai organisasi non-politis yang tidak hanya berfokus pada *speech act*, tetapi juga lebih menekankan pada penggunaan *pragmatic act* dalam upaya sekuritisasinya.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Konteks

Melalui kerangka teoritis sekuritisasi sosiologi, konteks mengacu pada fenomena objektif yang mencakup kondisi historis, situasional eksternal, atau ancaman nyata (*brute threat*) yang mempengaruhi responsivitas audiens terhadap klaim yang diajukan oleh aktor sekuritisasi. Penggunaan konsep konteks dalam menjawab strategi sekuritisasi mengacu pada pandangan eksternalis yang diajukan oleh Balzacq, yakni bahwa ujaran keamanan beresonansi dengan realitas eksternal. Dalam hal ini, konteks menentukan seberapa responsifnya audiens terhadap klaim ancaman.

1.6.1.2. Audiens

Konsep audiens merujuk pada subjek yang menjadi target persuasi bahwa objek referensi merupakan pihak yang merasa terancam (Buzan et al., 1998; Wertman & Kaunert, 2022). Lebih lanjut, Balzacq dalam *The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience, and Context* (2005) membagi audiens dalam proses sekuritisasi menjadi dua, yakni audiens formal dan moral. Audiens formal terdiri dari subjek yang memiliki kapasitas pengambilan kebijakan dalam rangka menanggapi ancaman keamanan, seperti aktor negara. Sedangkan itu, audiens moral terdiri dari masyarakat publik atau komunitas tertentu yang secara kolektif memiliki validasi normatif yang sama terhadap konstruksi ancaman. Kedua jenis audiens memiliki

hubungan yang saling berhubungan satu sama lain. Audiens formal memiliki kapasitas politik yang kuat dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk mendorong pergerakan audiens formal, aktor sekuritisasi memerlukan dukungan dan dorongan dari audiens moral (Balzacq, 2005, p. 185).

Sekuritisasi sosiologis bersifat *audience-centered*, dimana aktor sekuritisasi menyesuaikan tindakan konstruksi ancaman yang dilakukan dengan penerimaan audiens. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balzacq memperkenalkan konsep *semantic repertoire*, yakni bekal pengetahuan dan makna yang sudah dimiliki oleh audiens sebelum aktor sekuritisasi mengajukan klaim ancaman. *Semantic repertoire* tersebut diperoleh melalui kombinasi antara bahasa dan teks (*textual meaning*), maupun melalui pengalaman secara historis (*cultural meaning*).

Semantic repertoire berupa *textual meaning* yang merupakan modal pengetahuan melalui bahasa diperoleh melalui *zeitgeist* atau semangat zaman berupa pandangan sosial, tren, sikap ideologis, dan politik yang dominan dalam konteks audiens berada. Sedangkan itu, modal pengetahuan *cultural meaning* diperoleh melalui pengalaman historis oleh komunitas atau masyarakat lokal (*collective memories*). *Semantic repertoire* tersebut menjadi landasan dan modal bagi audiens untuk memaknai klaim keamanan yang diajukan oleh Greenpeace Malaysia.

1.6.1.3 Agensi

Konsep agensi mengacu pada kapabilitas dan konstruksi ancaman dari aktor sekuritisasi dalam menggunakan alat retorika untuk memenangkan audiens. Dalam

prosesnya, strategi yang digunakan oleh aktor sekuritisasi berkaitan dengan *habitus*, dimana tindakan diskursif aktor dibentuk oleh posisi institusionalnya dalam medan sosial. Kapabilitas dari aktor sekuritisasi dapat dianalisis melalui modal pengetahuan dan modal sosial yang dimiliki.

Sedangkan itu, tindakan konstruksi ancaman dianalisis melalui framing linguistik, penggunaan visual, koalisi dengan aktor lain, dan pembentukan laporan investigasi (Balzacq, 2011). Usaha-usaha konstruksi ancaman tersebut tercermin melalui pemilihan narasi tertentu dengan menekankan pada risiko atau bahaya dan dengan mengaitkan isu dengan nilai maupun norma yang dianggap penting untuk memproduksi rasa urgensi. Dalam hal ini, tindakan pragmatis yang dilakukan aktor sekuritisasi berputar pada bagaimana menyesuaikan dan beresonansi dengan *semantic repertoire* yang dimiliki oleh audiens untuk mencapai kesuksesan sekuritisasi.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Konteks

Penulis menggunakan konsep konteks untuk mengoperasionalkan peningkatan krisis ekologi dan kesehatan yang dialami dari masyarakat lokal pada saat Malaysia mulai menerima lonjakan impor limbah plastik pada tahun 2018.

1.6.2.2 Audiens

Konsep audiens digunakan untuk menganalisis target persuasi dari klaim ancaman praktik impor limbah plastik yang diajukan oleh Greenpeace Malaysia.

Dalam hal ini, audiens formal merujuk pada sektor institusional sebagai aktor dengan kapabilitas politik yang tinggi, sedangkan audiens moral merujuk pada komunitas lokal.

1.6.2.3 Agensi

Konsep agensi dalam penelitian ini dioperasionisasikan untuk menganalisis kapabilitas dan strategi aktif Greenpeace Malaysia dalam upaya sekuritisasi terhadap praktik impor limbah plastik di Malaysia.

Kapabilitas Greenpeace Malaysia dianalisis menggunakan dua indikator, yakni modal pengetahuan dan modal sosial yang dimiliki. Sedangkan itu, strategi aktif yang dilakukan Greenpeace Malaysia dianalisis melalui strategi penulisan dan distribusi publikasi digital berupa pemilihan framing, metafora, visual, serta strategi pragmatis lainnya. Strategi pragmatis yang diaplikasikan dalam wacana mengikuti setidaknya dua prinsip dasar, yakni *emotional intensity* yang mengedepankan aspek emosional dan *logical rigor* sebagai dasar epistemik bagi klaim yang diajukan oleh Greenpeace Malaysia (Balzacq, 2005, p. 190). Dalam prosesnya, strategi pragmatis Greenpeace Malaysia dibentuk dengan menyesuaikan *semantic repertoire* yang dimiliki oleh audiens dengan mencoba berfokus pada aktivasi modalitas *collective memories* dan *zeitgeist*.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang, teori, dan konsep yang telah dijabarkan, penulis berargumen bahwa strategi Greenpeace Malaysia bersifat *audience-centered* yang membuat strategi konstruksi ancaman praktik impor limbah plastik berkaitan erat dengan penyesuaian penerimaan audiens. Dalam hal ini, Greenpeace menargetkan dua audiens, yakni sektor negara sebagai aktor dengan kapabilitas pembentukan kebijakan publik dan komunitas atau masyarakat lokal sebagai pendorong pembentukan kebijakan oleh sektor negara. Untuk menunjang keberhasilan sekuritisasi, konstruksi ancaman memanfaatkan konteks situasional sosial-politik secara objektif yang dikombinasikan dengan penyesuaian modalitas pengalaman (*semantic repertoire*) kedua audiens.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang dijalankan untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi mengenai topik penelitian tertentu. Dalam meneliti mengenai peran Greenpeace dalam membentuk persepsi ancaman terhadap fenomena impor limbah plastik Malaysia, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai basis analisis.

Melalui Creswell & Creswell (2018), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengeksplorasi dan menginterpretasi makna yang dianggap individu atau kelompok tertentu sebagai suatu masalah sosial. Dalam praktiknya, metode kualitatif melibatkan prosedur yang bersifat berkembang, analisis data secara induktif, serta penafsiran makna dari data yang didapatkan. Justifikasi penggunaan metode

penelitian kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak menganalisis strategi sekuritisasi yang dilakukan oleh subjek penelitian, yakni Greenpeace Malaysia.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis strategi dan proses sekuritisasi yang dilakukan Greenpeace Malaysia terhadap praktik impor limbah plastik di negara tersebut. Menurut Purdy & Popan (2020), tipe penelitian deskriptif merupakan pendekatan metodologis yang memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perilaku, situasi, atau fenomena tanpa menyertakan prediksi teoritis maupun hubungan kausalitas antar variabel.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada latar fisik, alamiah, maupun sosial tempat penelitian terhadap isu yang diteliti sedang berlangsung (Creswell & Creswell, 2018). Dengan menyesuaikan tujuan penelitian yang berfokus untuk menganalisis strategi sekuritisasi Greenpeace Malaysia, maka lokasi situs penelitian ini secara daring di Greenpeace Malaysia dan melalui platform Zoom Meeting dengan narasumber juru kampanye Greenpeace Southeast Asia.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian merupakan Greenpeace Malaysia sebagai NGO di bidang lingkungan yang aktif dalam mengangkat praktik impor limbah plastik di negara tersebut sebagai sebuah ancaman.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian bersumber pada data kualitatif berupa publikasi yang ditulis dan didistribusikan oleh Greenpeace Malaysia, yakni artikel siaran pers (*press release*), laporan (*report*), dan cerita (*story*) pada rentang waktu pengunggahan dari 2018-2025.

Selain berupa publikasi digital, data kualitatif yang diperoleh penulis juga berupa keterangan narasumber yang merepresentasikan pandangan dan observasi Greenpeace Malaysia terhadap praktik impor limbah plastik.

1.8.5. Sumber Data

Dalam menganalisis strategi Greenpeace Malaysia dalam membentuk persepsi ancaman terhadap fenomena impor limbah plastik Malaysia, penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Heng Kiah Chun sebagai ahli strategi kampanye regional Greenpeace Asia Tenggara. Relevansi Heng Kiah Chun sebagai narasumber didasarkan pada pengalaman individu terkait dalam memimpin investigasi limbah plastik impor di Malaysia oleh Greenpeace Malaysia (2018-2021).

Sedangkan itu, data sekunder berupa kumpulan publikasi digital Greenpeace Malaysia, yakni artikel yang berada di bawah kategori siaran pers, cerita (*story*), dan laporan investigasi. Justifikasi pemilihan ketiga jenis publikasi tersebut sebagai sampel berkaitan dengan relevansinya sebagai representasi tindakan pragmatis sekuritisasi Greenpeace Malaysia.

Selain menggunakan publikasi digital Greenpeace Malaysia, penelitian ini turut menggunakan data sekunder berupa rekam jejak publikasi media massa Malaysia nasional dan global, laporan komunitas lokal terdampak di Malaysia, laporan NGO lokal, dokumen resmi pemerintah Malaysia, serta informasi yang diperoleh melalui media massa yang kebenarannya dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur yang berbasis pada dua teknik. Teknik pertama yang digunakan adalah *internet-based research* untuk mengumpulkan data sekunder, yakni metode yang memanfaatkan situs internet dalam mengumpulkan data (Krantz, 2010).

Data sekunder berupa rekam jejak publikasi media massa terkait dalam pemberitaan impor limbah plastik yang dilakukan oleh Malaysia dilakukan menggunakan bantuan dari instrumen *Google News*. Untuk mencari data rekam jejak publikasi media yang menggunakan informasi Greenpeace Malaysia sebagai rujukan penulisan, penelusuran menggunakan kata kunci dengan dua bahasa, yakni bahasa Inggris yang terdiri dari “*plastic waste import*” dan “*greenpeace malaysia*” untuk

media massa internasional, serta bahasa melayu, yaitu “*import sisa plastik*” untuk media massa lokal.

Sedangkan itu, data sekunder berupa publikasi Greenpeace Malaysia dikumpulkan pada situs resmi Greenpeace Malaysia menggunakan kata kunci “*plastic waste*”, “*import*”, dan “*malaysia*” dengan hasil diperoleh sebanyak 18 publikasi siaran pers, 4 publikasi laporan, 24 publikasi cerita.

Penelitian menerapkan metode *purposive sampling*, yakni metode pengambilan sampel non-probabilitas, dimana peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik spesifik yang relevan dengan cakupan penelitian (Bullard, 2020). Dengan mempertimbangkan tingkat relevansi substansi publikasi digital terhadap praktik impor limbah plastik di Malaysia, diperoleh hasil reduksi data berupa 7 publikasi siaran pers, 2 publikasi laporan, dan 8 publikasi cerita (Tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Daftar Publikasi Cerita, Siaran Pers, dan Laporan Investigasi Greenpeace Malaysia mengenai Praktik Impor Limbah Plastik

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Tautan Publikasi
Cerita	After ‘The Recycling Myth’ Report: Updates from the Field (Chun, 2019)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/1272/after-the-recycling-myth-report-updates-from-the-field/
	Why waste trade should be on the ASEAN summit agenda (Guerrero & Buakamsri, 2019)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/1953/why-waste-trade-should-be-on-the-asean-summit-agenda/

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Tautan Publikasi
	Unearthed: For the sake of the climate we must stop believing magical stories about plastics and recycling (Kahya, 2019)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/1974/unearthed-for-the-sake-of-the-climate-we-must-stop-believing-magical-stories-about-plastics-and-recycling/
	The plastic that keeps on giving (Omar, 2020)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/3507/the-plastic-that-keeps-on-giving/
	Pua Lay Peng, a frontline defender against plastic pollution in Malaysia (Chun, 2021)	https://www.greenpeace.org/international/story/48897/frontline-defender-against-plastic-pollution-malaysia/
	Sufficient for the past, but we are not dinosaurs (Chong, 2024)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/52666/sufficient-for-the-past-but-we-are-not-dinosaurs/
	ASEAN Leadership Key to the Success of Global Plastic Treaty to End Plastic Pollution (Civil Society Organization & Greenpeace Malaysia, 2024)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/52795/asean-leadership-key-to-the-success-of-global-plastic-treaty-to-end-plastic-pollution/
	Go BIG or go home: Malaysia at INC4 (Mahadevan, 2024)	https://www.greenpeace.org/malaysia/story/53982/go-big-or-go-home-malaysia-at-inc4/
Laporan	The Recycling Myth: Malaysia and The Broken Global Recycling System (Greenpeace Malaysia, 2018)	https://www.greenpeace.org/malaysia/report/1233/the-recycling-myth/?gp_anonymous_id=2ca153b0-f115-455b-98d0-c09b40210b01&gtm_utm_source=adwords&gtm_utm_medium=ppc

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Tautan Publikasi
	The Recycling Myth 2.0: The Toxic After-Effects of Imported Plastic Waste in Malaysia (Greenpace Malaysia, 2019b)	https://www.greenpeace.org/malaysia/report/3349/the-recycling-myth-2-0/
	'Recycling' from developed world dumped in Malaysia and left to rot (Greenpeace Malaysia, 2018)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/263/recycling-from-developed-world-dumped-in-malaysia/?gp_anonymous_id=2ca153b0-f115-455b-98d0-c09b40210b01&gtm_utm_source=adwords&gtm_utm_medium=ppc
Siaran pers	Greenpeace Pushes Back on 'Plastic Monster' Created by Corporations like Nestle (Greenpace Malaysia, 2019a)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/1367/greenpeace-pushes-back-on-plastic-monster-created-by-corporations-like-nestle/?gp_anonymous_id=2ca153b0-f115-455b-98d0-c09b40210b01&gtm_utm_source=adwords&gtm_utm_medium=ppc
	Malaysia's Government Return imported plastic waste to global north (Greenpeace Malaysia, 2019)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/1804/malaysias-government-returns-imported-plastic-waste-to-global-north/?gp_anonymous_id=2ca153b0-f115-455b-98d0-c09b40210b01&gtm_utm_source=adwords&gtm_utm_medium=ppc
	Waste Trade Woes (Greenpeace Malaysia, 2020)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/3367/waste-trade-woes/
	8 in 10 people in Malaysia support global plastics Treaty to Cut Plastic Production (Greenpeace Malaysia, 2024)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/52619/8-in-10-people-in-malaysia-support-global-plastics-treaty-to-cut-plastic-production/

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Tautan Publikasi
	Malaysian Government Returns to Sender (Taylor, 2019)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/3053/malaysian-government-returns-to-sender/?gp_anonymous_id=2ca153b0-f115-455b-98d0-c09b40210b01&gtm_utm_source=adwords&gtm_utm_medium=ppc
	Malaysia's Support of the Global Plastics Treaty at INC5.2 (Greenpeace Malaysia, 2025)	https://www.greenpeace.org/malaysia/press/62794/malaysias-support-of-the-global-plastics-treaty-at-inc5-2/?gp_anonymous_id=2ca153b0-f115-455b-98d0-c09b40210b01&gtm_utm_source=adwords&gtm_utm_medium=ppc

Sumber: Greenpeace Malaysia

Data sekunder terakhir berupa laporan atau dokumen NGO lokal, artikel jurnal, serta dokumen resmi pemerintah Malaysia yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan turut diperoleh melalui teknik *internet research*.

Teknik kedua yang digunakan adalah teknik wawancara semi-terstruktur dengan narasumber berupa ahli strategi kampanye regional Greenpeace Asia Tenggara untuk memperoleh data primer. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses yang mengolah dan menafsirkan data, serta variabel terkait menjadi serangkaian informasi yang dibutuhkan. Penelitian menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*), yakni metode analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif yang mencakup proses analisis dan interpretasi yang berfokus pada proses identifikasi pola dan tema (Miller, 2020). Justifikasi penggunaan analisis tematik berkaitan dengan relevansinya dengan tujuan penelitian yang hendak mengidentifikasi pola makna dalam sejumlah *pragmatic act* Greenpeace Malaysia.

Untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi data, sampel publikasi dikelompokkan menjadi tiga kategori utama dengan kode spesifik. Kategori publikasi cerita ditandai dengan kode ST, siaran pers ditandai dengan kode PR, dan terakhir, laporan investigasi memiliki kode INV. Setiap dokumen per kategorinya masing-masing memiliki nomor urut berdasarkan urutan kronologis penerbitannya. Rincian mengenai jenis publikasi, judul, dan kode analisis dijabarkan melalui tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Daftar Rincian Kodefikasi Sampel Publikasi Digital Greenpeace Malaysia

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Kode
Cerita	After ‘The Recycling Myth’ Report: Updates from the Field (Chun, 2019)	ST1

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Kode
	Why waste trade should be on the ASEAN summit agenda (Guerrero & Buakamsri, 2019)	ST2
	Unearthed: For the sake of the climate we must stop believing magical stories about plastics and recycling (Kahya, 2019)	ST3
	The plastic that keeps on giving (Omar, 2020)	ST4
	Pua Lay Peng, a frontline defender against plastic pollution in Malaysia (Chun, 2021)	ST5
	Sufficient for the past, but we are not dinosaurs (Chong, 2024)	ST6
	ASEAN Leadership Key to the Success of Global Plastic Treaty to End Plastic Pollution (Civil Society Organization & Greenpeace Malaysia, 2024)	ST7
	Go BIG or go home: Malaysia at INC4 (Mahadevan, 2024)	ST8
Laporan	The Recycling Myth: Malaysia and The Broken Global Recycling System (Greenpace Malaysia, 2018)	INV1

Jenis Publikasi	Judul Publikasi	Kode
	The Recycling Myth 2.0: The Toxic After-Effects of Imported Plastic Waste in Malaysia (Greenpace Malaysia, 2019b)	INV2
	‘Recycling’ from developed world dumped in Malaysia and left to rot (Greenpeace Malaysia, 2018)	PR1
	Greenpeace Pushes Back on ‘Plastic Monster’ Created by Corporations like Nestle (Greenpace Malaysia, 2019a)	PR2
	Malaysia’s Government Return imported plastic waste to global north (Greenpeace Malaysia, 2019)	PR3
Siaran pers	Waste Trade Woes (Greenpeace Malaysia, 2020)	PR4
	8 in 10 people in Malaysia support global plastics Treaty to Cut Plastic Production (Greenpeace Malaysia, 2024)	PR5
	Malaysian Government Returns to Sender (Taylor, 2019)	PR6
	Malaysia’s Support of the Global Plastics Treaty at INC5.2 (Greenpeace Malaysia, 2025)	PR7

Sumber: Greenpeace Malaysia (diolah penulis)

1.8.8. Kualitas Data

Penelitian ini memiliki kualitas data yang baik, dibuktikan dengan beberapa metode yang digunakan penulis dalam rangka memastikan kredibilitas (*credibility*) dan konfirmabilitas (*confirmability*) dari penelitian. Untuk memastikan kredibilitas penelitian, penulis menggunakan metode triangulasi (*triangulation*), yakni metode

validasi data dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan dan sumber data penelitian yang bervariasi (Yadav, 2022, p. 683). Sedangkan untuk memastikan konfirmabilitas penelitian, penulis memastikan bahwa penelitian merupakan hasil dari analisis secara objektif dan tidak terpengaruhi oleh subjektivitas penulis.